

Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020

Indah Syamsuddin¹, Putri Nurjannah Muhammad², Abdul Karim^{✉ 3}

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa*

Abstrak

Analisis belanja penting dilakukan karena belanja merupakan kegiatan rutin pemerintah yang rentan terhadap kebocoran dan inefisiensi jika perencanaan, pengawasan dan pengendalian yang baik tidak dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perealisasi anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan untuk mengetahui kinerja anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Objek penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Alat analisis yang digunakan yaitu alat analisis kinerja belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja telah dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan belanja positif dan efisien, namun dalam hal keserasian belanja, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat perlu meningkatkan belanja modal.

Kata Kunci : *Anggaran Belanja, Analisis Kinerja Anggaran.*

Copyright (c) 2022 Abdul Karim

✉ Corresponding author :

Email Address : abdul.karim8284@gmail.com

PENDAHULUAN

Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2016 pemerintah melakukan reformasi dibidang anggaran baik pada sisi belanja, pendapatan maupun pembiayaan (Jumarding dkk, 2021). Reformasi ini diterapkan untuk mengubah anggaran-anggaran yang tidak produktif dan tepat sasaran kearah yang lebih tepat dan efisien penggunaannya. Reformasi Keuangan Negara bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, kualitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara yang berorientasi untuk kemakmuran rakyat (Abubakar dkk, 2021). Reformasi keuangan negara ini ditandai dengan disahkannya tiga Undang Undang (UU) dalam Bidang Keuangan Negara yakni:

- 1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone) penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut, pembaca laporan dapat membuat hasil analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis belanja, analisis pendapatan, serta analisis pembiayaan (Rabiyah dkk, 2021). Anggaran memiliki peran penting dalam penyelenggaraan semua aktivitas pemerintahan dan sebagai alat perencanaan, stabilisasi, distribusi, pengelolaan sumber daya, pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (Karim, 2019). Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efisiensi dan efektifitas suatu belanja operasi dengan membandingkan antara anggaran

dengan hasil real (realisasi terkini) yang telah dicapai. Berdasarkan Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer (Dindayani, 2020). Definisi belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara dalam periode tahun anggaran berjalan yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan pemerintah tidak akan memperoleh pembayarannya kembali. Belanja negara merupakan salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan Maddatuang dkk, 2021). Proses belanja harus dilakukan secara terkendali oleh karena itu mekanisme belanja harus disusun seefisien dan seefektif mungkin. Auditor pemerintah lebih memperhatikan pada audit atas belanja, karena sebagian besar kebocoran APBN terjadi dalam pelaksanaan belanja. Kebocoran tersebut disebabkan karena adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maupun karena kurangnya pemahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja (Karim dkk, 2021). Klasifikasi belanja pada Komisi Pemilihan Umum yaitu belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang.

Maka dari itu sebagai pemegang kuasa atas penggunaan dan pengelolaan anggaran, instansi pemerintah berpedoman pada tujuan Rencana Kerja pemerintah (RKP) selalu berkaitan dengan kinerja anggaran yang menjadi pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran yang terdapat dalam laporan keuangan (Nanna, 2020). Pengukuran kinerja sangat penting untuk membantu para pengambil keputusan dalam memantau dan memperbaiki kinerja serta berfokus pada tujuan instansi dan untuk menilai akuntabilitas instansi bahwa anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis serta pimpinan memberikan pelayanan publik yang lebih baik (Ismail & Irwan, 2021). Belanja yang merupakan kegiatan rutin pemerintah menjadi momok dan rentan akan kebocoran dan inefisiensi jika tidak dilakukan perencanaan, pengawasan serta pengendalian yang baik, oleh karena itu analisis belanja mutlak harus dilakukan agar menjadi dasar evaluasi, perbaikan dan koreksi kedepan (Oktaviani, 2020). Selain itu belanja menjadi komponen yang penting bagi masyarakat selaku pemberi pajak daerah /public fund untuk mengetahui dan menilai anggaran belanja yang dikelola pemerintah telah dilaksanakan untuk kepentingan public, efektif dan efisien (Puspitasari dkk, 2021).

Berikut ini disajikan anggaran dan realisasi belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2020.

Tabel 1. Anggaran belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2020

Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)
2018	3.929.634.000,-	13.166.919.000,-	508.015.000,-
2019	4.943.424.000,-	18.994.512.000,-	838.595.000,-
2020	4.175.692.000,-	2.656.356.000,-	74.000.000,-

Sumber: SPAN Kementerian Keuangan, 2021.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal mengalami kenaikan pagu dari tahun 2018 ke tahun 2019 kemudian mengalami penurunan pagu pada tahun 2020. Hal ini belum dapat menjelaskan apakah anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal menunjukkan hasil yang baik atau sebaliknya (Kasim, 2020).

Tabel 2. Realisasi belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2020

Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)
-------	----------------------	---------------------	--------------------

2018	3.916.403.322,-	11.303.222.924,-	490.287.900,-
2019	3.925.157.815,-	17.769.062.691,-	520.679.545,-
2020	4.139.034.703,-	2.439.791.303,-	73.954.000,-

Sumber: SPAN Kementerian Keuangan, 2021.

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2019 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 (Nurhidayanti dkk, 2022). Hal ini belum dapat menjelaskan apakah realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal menunjukkan hasil yang baik atau sebaliknya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Ambar & Rosidah, 2009). Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau pun mencari implikasi (Azwar, 2008).

Penelitian ini mengambil data secara sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan berupa laporan realisasi anggaran KPU Provinsi Sulawesi Barat, serta data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, dan sumber tertulis lainnya, seperti jurnal dan referensi lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka. Data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik. Observasi teknik yang digunakan dalam meneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan pada KPU Provinsi Sulawesi Barat memperoleh informasi secara luas dan relevan mengenai kinerja anggaran belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif. Adapun metode analisis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis kinerja belanja (Sugiyono, 2004).

1. Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja)

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja - Anggaran Belanja

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan Belanja Tahun_t = $\frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } t-1}{\text{Realisasi belanja Tahun } t-1} \times 100\%$

3. Analisis Keserasian Belanja

a. Analisis belanja operasi terhadap total belanja

b. Rasio belanja operasi terhadap belanja = $\frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$

4. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja = $\frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Varians Belanja (selisih belanja)

Analisis varians merupakan analisis perbedaan atau selisih antara anggaran belanja dengan realisasinya.

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja - Anggaran Belanja

Tabel 3. Analisis Varians Belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Varians Belanja (Rp)	%
2018	15.709.914.146,-	17.604.568.000,-	1.894.653.854,-	89,24
2019	22.214.900.051,-	24.776.540.000,-	2.561.639.949,-	89,66
2020	6.652.780.006,-	6.906.048.000,-	253.267.994,-	96,33

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja yang tampak pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat selisih antara realisasi dan anggaran yang ada. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, 2019 dan 2020 jumlah realisasi belanja lebih kecil daripada anggaran belanja yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2018 nilai varians sebesar Rp. 1.894.653.854,- atau 89,24% dari total pagu APBN, tahun 2019 nilai varians sebesar Rp. 2.561.639.949,- atau 89,66% dari total pagu APBN, dan tahun 2020 nilai varians sebesar Rp. 253.267.994 atau 96,33% dari total pagu APBN. Secara umum terjadinya selisih antara realisasi dan anggaran karena kurang tepatnya saat melakukan perencanaan anggaran untuk satu periode atau karena tidak terlaksananya suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran maka penghematan dari sisa anggaran tersebut dilakukan penggeseran pada pos-pos belanja yang masih kurang. Anggaran belanja merupakan batas tertinggi dalam pengeluaran yang boleh dilakukan (Kurniasari, 2020). Kinerja instansi pemerintah dinilai baik apabila mampu melakukan efisiensi belanja dengan tidak melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan, namun sebaliknya jika belanja yang dilaksanakan melebihi anggaran maka dapat mengindikasikan terjadinya inefisiensi belanja sehingga kinerja instansi pemerintah kurang baik (Desi dkk, 2021).

2. Analisis pertumbuhan belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui dan menilai perkembangan belanja dari tahun ke tahun.

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun}_t = \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } t-1}{\text{Realisasi belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

Tabel 4. Pertumbuhan belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat 2019

Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Pertumbuhan kenaikan / penurunan (Rp)	%
Belanja operasi:				
1. Belanja pegawai	3.925.157.815,-	3.916.403.322,-	8.754.493,-	0,22
2. Belanja barang	17.769.062.691,-	11.303.222.924,-	2.439.791.303,-	57,20
Belanja modal	502.679.545,-	490.287.900,-	73.954.000,-	6,20

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 5. Pertumbuhan belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat 2020

Uraian	Realisasi Belanja	Realisasi	Pertumbuhan kenaikan	%
	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	/ penurunan (Rp)	
Belanja operasi:				
3. Belanja pegawai	4.139.034.703,-	3.925.157.815,-	213.876.888,-	5,45
4. Belanja barang	2.439.791.303,-	17.769.062.691,-	- 15.329.271.388,-	-86,27
Belanja modal	73.954.000,-	520.679.545,-	446.725.545,-	-85,80

Sumber: Data diolah, 2021.

Penyebab terjadinya kenaikan belanja biasanya dipengaruhi oleh perubahan kurs rupiah, adanya inflasi dan penyesuaian faktor ekonomi makro. Pertumbuhan anggaran belanja tertentu bisa saja negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang belanja tersebut tidak prioritas untuk tahun sekarang. Pertumbuhan belanja harus seiring dengan pertumbuhan pendapatan.

3. Analisis keserasian belanja

Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui dan menilai keseimbangan antar belanja yang berfungsi sebagai alat stabilisasi dan distribusi.

a. Analisis belanja operasi terhadap total belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja memberikan informasi terkait porsi belanja yang digunakan dalam pelaksanaan belanja operasi pada tahun yang bersangkutan. Analisis ini dihitung dengan perbandingan antara total realisasi belanja operasi dengan total belanja.

$$\text{Rasio belanja operasi terhadap belanja} = \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

Tabel 6. Analisis belanja operasi Tahun 2018 - 2020

Tahun	Total belanja operasi (Rp)	Total belanja (Rp)	Rasio belanja operasi (%)
2018	15.219.626.246,-	15.709.914.146,-	96,88
2019	21.694.220.506,-	22.214.900.051,-	97,66
2020	6.578.826.006,-	6.652.780.006,-	98,89

Sumber: Data diolah, 2021.

b. Analisis belanja modal terhadap total belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja memberikan informasi terkait porsi belanja yang digunakan dalam pelaksanaan belanja modal. Analisis ini dihitung dengan perbandingan antara total belanja modal terhadap total belanja.

$$\text{Rasio belanja operasi terhadap belanja} = \frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja}} \times 100$$

Tabel 7. Analisis belanja modal Tahun 2018 – 2020

Tahun	Total belanja operasi (Rp)	Total belanja (Rp)	Rasio belanja modal (%)
2018	490.287.900,-	15.709.914.146,-	3,21
2019	520.679.545,-	22.214.900.051,-	2,34
2020	73.954.000,-	6.652.780.006,-	1,11

Sumber: Data diolah, 2021.

4. Rasio efesiensi belanja

Pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya, jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

Tabel 8. Analisis efesiensi balanja

Tahun	Realisasi belanja (Rp)	Anggaran belanja (Rp)	Rasio efesiensi (%)	Kriteria kemampuan
2018	15.709.914.146,-	17.604.568.000,-	89,24	Efisiensi
2019	22.214.900.051,-	24.776.540.000,-	89,66	Efisiensi
2020	6.652.780.006,-	6.906.048.000,-	96,33	Efisiensi

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 8 diatas, analisis efisiensi belanja menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2018-2020. Hal ini ditunjukkan dari realisasi belanja yang tidak melebihi anggaran belanja. Sesuai dengan pendapat Mahmudi (2010:166) Pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Dapat dilihat pada tahun 2018 rasio efisiensi belanja sebesar 89,24% sebagai rasio efisiensi terendah, tahun 2019 sebesar 89,66% dan tahun 2020 sebesar 96,33% sebagai rasio efisiensi tertinggi.

SIMPULAN

Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terdapat selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2018 nilai varians sebesar Rp 1.894.653.854 atau 89,24% dari total pagu APBN, tahun 2019 nilai varians sebesar Rp 2.561.639.949 atau 89,66% dari total pagu APBN, dan tahun 2020 nilai varians sebesar Rp 253.267.994 atau 96,33% dari total pagu APBN. Pada perhitungan pertumbuhan belanja dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 terjadi kenaikan realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 8.754.493 atau sebanyak 0,22%, kenaikan belanja barang sebesar Rp 2.439.791.303 atau sebanyak 57,02 % dan kenaikan pada belanja modal sebesar Rp 73.954.000 atau sebanyak 6,20%. Kemudian pada tahun 2020 terjadi kenaikan realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 213.876.888 atau sebanyak 5,45%, namun mengalami penurunan pada belanja barang sebesar -Rp 15.329.271 atau sebanyak -86,27% dan penurunan pada belanja modal sebesar -Rp 446.725.545 atau sebanyak -85,80%.

Berdasarkan hasil analisis belanja operasi, secara umum dapat dikatakan Sebagian besar alokasi APBN dilakukan untuk belanja operasi. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata belanja operasi terhadap total belanja sebesar 97,81%. Selain itu dapat dilihat pada tahun 2020 terjadi rasio belanja operasi tertinggi yaitu sebanyak 98,89%, sedangkan pada tahun 2018 terjadi rasio belanja operasi terendah yaitu sebanyak 96,88%. Jika dilihat dari hasil analisis belanja modal, secara umum dapat dikatakan sebagian kecil alokasi APBN dilakukan untuk belanja modal, hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 2,19%. Selain itu dapat dilihat pada tahun 2010 terjadi rasio belanja operasi tertinggi yaitu sebanyak 3,12%, sedangkan pada tahun 2018 terjadi rasio belanja operasi terendah yaitu sebanyak 1,11%. Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2018-2020. Hal ini ditunjukkan dari realisasi belanja yang tidak melebihi anggaran belanja yaitu pada tahun 2018 rasio efisiensi belanja sebesar 89,24% sebagai rasio efisiensi terendah, tahun 2019 sebesar 89,66% dan tahun 2020 sebesar 96,33% sebagai rasio efisiensi tertinggi. Sesuai dengan perhitungan hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2020 telah dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan belanja positif atau meningkat, seimbang serta efisien.

Referensi :

- Abubakar, H., Palisuri, P., Hernita, H., Syarifuddin, S., Syamsuddin, I., & Herman, R. (2021, December). *KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO DAN KECIL PEDESAAN MELALUI PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA LOKAL*. In *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (Pp. 480-485).
- Ambar, Teguh Sulistiyani., & Rosidah. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Azwar, Saifuddin. (2008). *Reliabilitas Dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desi, N., Sabri, M., Karim, A., Gonibala, R., & Wekke, I. S. (2021). *Environmental Conservation Education: Theory, Model, And Practice*. *Psychology And Education Journal*, 58(3), 1149-1162.
- Dindayani, N. (2020). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Dalam Menunjang Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Pengendalian Intern Pada PT Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall Ratu Indah*. *Economics Bosowa*, 5(003), 172-185.
- Ismail, A., & Irwan, A. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Pada Manajemen Pendidikan Tinggi*. Nas Media Pustaka.
- Jumarding, A., Mane, A. A., & Karim, A. (2021). *Desa Wisata Menunjang Transformasi Ekonomi Nasional Di Kabupaten Enrekang*.
- Karim, A. (2019). *Pengaruh Tagline Iklan Versi "Axis Hits Bonus" Dan Brand Ambassador Terhadap Brand Awareness Kartu Axis (Studi Pada Mahasiswa STIE Amkop Makassar)*. *Movere Journal*, 1(1), 1-13.
- Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). *The Increase Of Rural Economy At Baraka Sub-District Through Village Funds*. *The Winners*, 22(1).
- Kasim, M. I. (2020). *Pengaruh Inovasi Dan Kreativitas Pengajaran Terhadap Kinerja Guru Sd Inpres Samata Kabupaten Gowa*. *Economics Bosowa*, 6(001), 200-212.
- Kurniasari, D. (2020). *Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara)*. *Economics Bosowa*, 6(003), 42-51.
- Maddatuang, B., Syukur, A., & Karim 3rd, A. (2021). *The Role Of Bumdes In Sustainable Economic At Enrekang Regency*. *Indian Journal Of Economics And Business*, 20(2).
- Nanna, V. (2020). *Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Terhadap Perolehan Laba Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cabang Makassar 1*. *Economics Bosowa*, 6(002), 81-94.

- Nurhidayanti, S., Galib, M., & Jumarding, A. (2022). Pengaruh Penerapan Peraturan DJP Terkait Kepatuhan WPOP Dalam Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Economics Bosowa*, 8(001), 1-10.
- Oktaviani, E. (2020). Analisis Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Pada PT. Jalan Tol Seksi Empat. *Economics Bosowa*, 5(002), 98-107.
- Puspitasari, S., Mane, A., & Syamsuddin, I. (2021). PENGARUH MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA TERHADAP PEMBELAJARAN DARING (STUDI KASUS MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS BOSOWA). *Economics Bosowa*, 7(003), 216-227.
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect Of Awareness, Fiscus Services And Taxation Knowledge On Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. *International Journal Of Innovation Scientific Research And Review*, 3(1), 797-799.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.